BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik Rusia dan Ukraina di wilayah Semenanjung Crimea menjadi isu penting dalam ranah internasional, karena dapat berdampak besar bagi negara lain, baik itu dari segi politik maupun ekonomi. Dalam konflik itu juga sudah banyak korban yang tewas dari serangan-serangan militer kedua negara, baik dari warga sipil maupun militer. Adapun referendum yang dilakukan oleh Rusia beserta parlemen Crimea membuat kedaulatan Ukraina terancam. Referendum yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 yang menghasilkan 96,8 % penduduk Semenanjung Crimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Hal ini lah yang membuat perdebatan di kancah internasional, terkait legal hukum referendum tersebut.

Banyak negara-negara dan organisasi internasional termasuk PBB yang menolak hasil referendum tersebut karena selama pelaksanaannya tidak adanya pengawasan dari PBB. Dari referendum yang dilakukan oleh Rusia inilah yang beribas kepada konflik, karena pemerintah Ukraina menolak pengambilan kekuasaan wilayah Semenanjung Crimea oleh Rusia dan masih mengakui bahwa wilayah Semenanjung Crimea masih merupakan wilayah kedaulatan Ukraina.

Adapun munculnya Uni Eropa dalam konflik tersebut karena Uni Eropa merasa bahwa stabilitas kawasan Eropa mulai terganggu dan kepentingan dari segi politik dan ekonominya dengan kedua negara menurun akibat dari konflik ini. Maka

dari itu Uni Eropa mengatur langkah-langkah dalam upaya penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina, yaitu:

1. Mempertemukan Rusia dan Ukraina di Minsk (Belarusia), 11-12 Februari 2015. Pada pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Ukraina, Petro Poroschenko serta perwakilan petinggi Uni Eropa sekaligus presiden Jerman, Angela Merkel dan Presiden Perancis, Francois Hollande, yang membahas kembali gencatan senjata yang sudah dilakukan sebelumnya pada September 2014, yang di rasa tidak efektif oleh kedua negara dan Uni Eropa sehingga di lakukan kembali pada pertemuan Minsk II (11-12 Februari 2015).
2. Pembuatan Kesepakatan Perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pembuatan kesepakatan tersebut merupakan penegasan kembali terhadap kedua negara agar menaati gencatan senjata dan tidak melakukan agresi-agresi militer lagi di wilayah Ukraina. Pembuatan kesepakatan ini juga merupakan bentuk dokumen legal yang ditandatangani oleh kedua negara.
3. Pengawasan Situasi di Wilayah Terjadinya Konflik. Hal ini dilakukan oleh *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) yang di dukung oleh Uni Eropa agar tidak terjadi lagi agresi militer yang tidak diinginkan di wilayah Ukraina.

Dari upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina di wilayah Semenanjung Crimea mengalami kendala, walapun kendala yang dihadapi Uni Eropa hanya di awal keterlibatannya dalam proses

penyelesaian konflik. Kendalanya yaitu tidak di taatinya himbauan gencatan senjata yang sudah di sepakati pada Minsk I dan tetap terjadi agresi militer antara kedua negara.

Melihat kondisi Semenanjung Crimea saat ini, sudah mulai mengalami stabilitas. Saat ini, untuk sementara waktu, wilayah Semenanjung Crimea masih berada dalam wilayah kekuasaan Federasi Rusia sampai dilakukannya pembahasan mengenai wilayah tersebut dengan Ukraina. Menurut pemerintah Ukraina juga, menyatakan bahwa Semenanjung Crimea berada dalam kekuasaan Rusia akan tetapi kedaulatan legal Semenanjung Crimea tetap berada di kedaulatan Ukraina, dan hal ini di sepakati juga oleh dunia internasional seperti PBB dan NATO. Konflik di Semenanjung Crimea saat ini terus di *monitoring* oleh Uni Eropa dan OSCE agar tidak timbul pelanggaran-pelanggaran yang sudah disepakati dalam gencatan senjata.

5.2 Saran

1. Uni Eropa seharusnya lebih tegas dalam pelaksanaan gencatan senjata, ketika ada diantara salah satu negara atau kedua negara yang melanggar kesepakatan tersebut, dikenakan sanksi yang berat. Hal ini menjadi persoalan utama, karena dikhwatirkan konflik seperti di wilayah Semenanjung Crimea bisa melebar dan wilayah lain terkena imbasnya.
2. Pemerintah Rusia dan pemerintah Ukraina sebaiknya menaati gencatan senjata dan melakukan perdamaian seutuhnya. Mencari solusi terbaik terkait wilayah Semenanjung Crimea dan juga melihat banyaknya korban dari konflik yang terjadi.